

## Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali

<sup>1</sup> Gek Ayu Nina, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana – Indonesia

<sup>2</sup> Surya Dewi Rustariyuni, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana – Indonesia

### Informasi Naskah

Submitted: 10 November 2018

Revision: 16 Februari 2020;

Accepted: 27 April 2020

### Kata Kunci:

Gini Rasio, IPM, Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesejahteraan Masyarakat

### Abstract

*The paradigm of human development has made humans as subjects in economic development. These changes will improve human quality so that humans can become capital in economic development that aims to improve people's welfare. Community welfare is an essential point to be achieved in the SDGs can be measured through HDI. National HDI Bali in 2016 Bali HDI is in the middle category, which is equal to 73.65 per cent. However, after being seen in each regency/city it turns out there are five districts which have an average HDI below the provincial average. The objectives of the study were to be achieved: 1) to analyze the influence of the Gini ratio and non-food expenditure per capita on poverty in the regency/city of Bali Province; 2) To analyze the influence of the Gini ratio, non-food expenditure per capita and poverty on the welfare of the community in the regency/city of Bali Province; and 3) To analyze the influence of the Gini ratio and non-food expenditure per capita through poverty on the welfare of the community in the regency/city of the Province of Bali. The analysis technique uses path analysis and Gini research results. The ratio has a positive effect on poverty, and non-food expenditure has a significant negative effect on poverty. The results of testing the Gini variable ratio on community welfare, the Gini ratio has no effect, while non-food expenditure has a positive effect and poverty has a negative and significant effect on people's welfare*

### Abstrak

Paradigma pembangunan manusia saat ini telah menjadikan manusia sebagai subjek dalam pembangunan ekonomi. Perubahan tersebut akan meningkatkan kualitas manusia, sehingga manusia dapat menjadimodal dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sebagai point penting yang ingin dicapai dalam SDGs, dapat diukur melalui IPM. IPM Bali secara nasional pada tahun 2016 IPM Bali berada pada kategori menengah yaitu sebesar 73,65 persen, namun setelah dilihat di setiap kabupaten/kotanya ternyata terdapat lima kabupaten yang memiliki rata-rata IPM dibawah rata-rata provinsi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai : 1) untuk menganalisis pengaruh gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali; 2) Untuk menganalisis pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali; dan 3) Untuk menganalisis pengaruh gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Teknik analisis menggunakan analisis jalur dan hasil penelitian Gini Rasio berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan pengeluaran non makanan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil pengujian variabel Gini Rasio terhadap kesejahteraan masyarakat, gini rasio tidak berpengaruh, sedangkan pengeluaran non makanan berpengaruh positif dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

\* Corresponding Author.

Gek Ayu Nina, e-mail: [ayunina0268@gmail.com](mailto:ayunina0268@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.28>

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam SDGs sebagai salah satu point penting yang akan dicapai tahun 2030. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia pasca krisis tahun 1997 terus mengalami perkembangan yang meningkat di tiap periodenya, akan tetapi ketika terjadi krisis global pada akhir tahun 2008, perkembangan IPM akhirnya mengalami penurunan yang tajam di tahun 2010, sehingga terjadi peningkatan kembali pada tahun 2011-2016. Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2016, menyandang posisi ke empat nasional dengan nilai IPM sebesar 73,65 persen. Ketika dilihat di masing-masing kabupaten/kota, ternyata hanya empat kabupaten/kota yang memiliki rata-rata IPM di atas provinsi dimana tiga diantaranya dikategorikan pada IPM menengah ke atas. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah kemiskinan (Widyastuti, 2012). Dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh adanya kemiskinan membuat kemiskinan sebagai suatu penyakit yang harus segera diatasi oleh setiap daerah khususnya di Provinsi Bali, mengingat kemiskinan digunakan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan baik daerah maupun nasional (Murdiansyah, 2014). Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas.

Kemiskinan sebagai perma-salahan yang terjadi di berbagai belahan dunia sering dikaitkan dengan isu ketimpangan pendapatan (Sugiyarto dan Saleky, 2015). Menurut Barber (2008) hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan merupakan hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan adalah bentuk dari kemiskinan. Pada tulisan Rodriguez-Paso dan Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan ketimpangan. Hal tersebut juga searah dengan statistik yang menunjukkan bahwa memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kemiskinan (Ganie-Rochman, 2013). Pratowo (2013), Yasa dan Arka (2015) menyimpulkan bahwa ketimpangan yang diukur dengan gini rasio, memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan hasil penelitian Rustariyuni (2013), bahwa gini rasio memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan masyarakat menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali tercermin pada pengeluaran non makanan per kapita (Rustariyuni, 2013). Semakin meningkatnya proporsi pengeluaran non makanan masyarakat, menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat yang semakin tinggi (Pratowo, 2013). Finkayana dan Dewi (2016) menyatakan bahwa pengeluaran per kapita memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran non makanan seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang dilakukan oleh penduduk kabupaten/ kota Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan rendah seharusnya lebih besar di banding dengan kabupaten/ kota yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi Subarna (2012). Fakta yang terjadi adalah tingginya pengeluaran non makanan per kapitadi Kota Denpasar tahun 2015-2016, ternyata kemiskinan di Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Badung. paling rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.
2. Untuk menganalisis pengaruh gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.
3. Untuk menganalisis pengaruh gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Bali.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera mengarah pada suatu kondisi orang yang berada dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Masyarakat yang sejahtera adalah mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani (Prastyadewi dkk, 2013). Todaro dan Smith (2006 : 236) secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (welfare) dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = W (Y, I, P) \dots\dots\dots Y$$

adalah pendapatan perkapita, I adalah ketimpangan dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda, dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan (1) tersebut, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan.

### Konsep Indeks Pembangunan Manusia

UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya pada tahun 1990. Indikator tersebut dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang disebut Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM telah diterima secara luas sebagai ukuran perkembangan manusia (Hariwan dan Swaningrum, 2015). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Indikasi pembangunan manusia yang semakin baik, apabila angka IPM semakin mendekati 100. Metode perhitungan IPM yang diperkenalkan oleh UNDP kemudian direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living).

### Definisi Kemiskinan

Menurut World Bank, definisi kemiskinan adalah: "The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other". Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti : tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005).

Menurut Todaro (2000 : 203) kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas : kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

### Konsep Ketimpangan

Cherodian dan Thirlwall (2013) menyebutkan bahwa ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Menurut Breau dan Saillant (2016), salah satu faktor yang dianggap menyebabkan ketimpangan semakin besar adalah perbedaan geografis. Pendapat lainnya Fleisher (2010) yaitu, faktor-faktor penentu ketimpangan antar wilayah adalah modal fisik, modal manusia dan modal infrastruktur. Terjadinya ketimpangan di suatu daerah tidak hanya memberikan dampak negatif yang dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, melainkan dapat memberikan dampak positif yaitu memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya (Todaro dan Smith, 2006 : 235).

Nugraha dan Lewis (2013) menyatakan bahwa, cara yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah gini rasio. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Faktanya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,75, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Semakin besar nilai koefisien Gini, maka mengindikasikan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan (Todaro dan Smith 2006:235). Perhitungan gini rasio dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (BPS, 2018).

$$G = 1 - \sum_{(i=1)}^k (P_{(i)} (Q_i - Q_{(i-1)})) / 10.000.. \quad (2)$$

Keterangan:

Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-1

Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

### **Konsep Pengeluaran Non Makanan per Kapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Perhitungan pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan formula berikut (BPS, 2018):

$$PPK = TP/JA \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

PPK = Pengeluaran per kapita

TP = Total pengeluaran rumah tangga dalam sebulan

JA = Jumlah anggota rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran nonmakanan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap proporsi pengeluaran untuk makanan (BPS, 2018). Menurut model hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow disebutkan bahwa kebutuhan manusia diatur dalam suatu hierarki dibagian bawah sampai kebutuhan yang paling tidak mendesak dibagian atas. Pertimbangan dalam mengkonsumsi adalah berdasarkan kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu, ketika kebutuhan yang paling dasar sudah terpenuhi maka kebutuhan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi akan muncul (Maslow 1984: 39).

Konsep penelitian ini menganalisis mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan angka IPM dalam satuan persen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah ketimpangan yang diproksikan dengan gini rasio dan pengeluaran non makanan. Variabel intervening yang digunakan adalah kemiskinan yang ada di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bali.

Konsep penelitian ini menganalisis tentang kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Bali. Beberapa faktor seperti gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita akan mempengaruhi persentase penduduk miskin sehingga dapat diketahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan angka IPM dalam satuan persen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah gini rasio dan pengeluaran non makanan. Variabel intervening yang digunakan adalah kemiskinan yang ada di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bali.

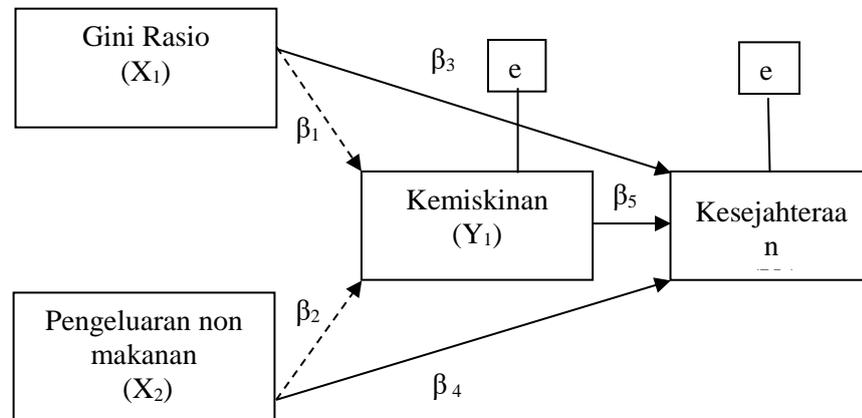
Kesejahteraan rumah tangga juga dapat diidentifikasi melalui besar kecilnya proporsi pengeluaran yang mencerminkan tinggi rendahnya pendapatan. Pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat dapat diproksi dengan proporsi pengeluaran non makanan per kapita (Rustariyuni,

2013).

Pengeluaran non makanan per kapita yang tinggi dari keseluruhan pengeluarannya berarti kesejahteraan masyarakat semakin tinggi karena pengeluaran non makanan yang meliputi pengeluaran untuk kesehatan maupun pendidikan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur IPM. Hubungan antara pengeluaran non makanan per kapita dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Chalid (2010), Pratowo (2013) dan Sutawijaya, dkk. (2013) menemukan bahwa pengeluaran non makanan per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IPM.

Menurut Mirza (2011) semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang di dukung oleh pendapatan yang semakin tinggi tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan menuju pada hidup yang lebih sejahtera. Hubungan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan telah diteliti oleh Finkayana dan Dewi (2016) dan Kumalasari (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Menurut Solikatur, dkk (2014) kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi indikator yang menyusun nilai IPM. Hubungan antara kemiskinan dan IPM dalam penelitian Chalid dan Yusuf (2014), Dewi (2017), Manik (2013), Mirza (2011), Suwandi (2016) dan Widodo (2011) yaitu negatif dan signifikan.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali adalah gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita, belanja modal dan kemiskinan. Gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita, belanja modal diduga secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan. Kerangka penelitian ini seperti dijelaskan dalam Gambar 1 berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Gini Rasio dan Pengeluaran Non Makanan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali**

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis jalur (*Path Analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2012:159). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots 4)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots 5)$$

Keterangan :

$Y_1$  = Kemiskinan

$Y_2$  = Kesejahteraan masyarakat

$\beta_{1,2,3,4,5}$  = Koefisien regresi atau slope

$X_1$  = Gini rasio

$X_2$  = Pengeluaran non makanan per kapita

$e_i$  = variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Gini Rasio dan Pengeluaran Non makanan terhadap Kemiskinan

Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita terhadap kemiskinan. Hasil pengujian variabel gini rasio terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ , memiliki arti variabel gini rasio. berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut berarti semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan yang diproksikan melalui gini rasio dalam satu satuan maka, kemiskinan akan meningkat sebesar 0,223 dengan anggapan faktor lainnya konstan. Variabel pengeluaran non makanan per kapita dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut berarti setiap kenaikan pengeluaran non makanan per kapita sebesar seribu rupiah, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,915 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Persamaan struktur satu adalah sebagai berikut:

$\hat{Y}_1$	=	0,223 $X_1$ - 0,915 $X_2$
S.E	=	(3,502) (0,001)
T hitung	=	(3,338) (-13,695)
Sig.	=	(0,002) (0,000)
$R^2$	=	0,786
F	=	93,775
Prob F	=	0,000

Keterangan:

$\hat{Y}_1$  = Kemiskinan

$X_1$  = Gini rasio

$X_2$  = Pengeluaran non makanan per kapita

### **Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan per Kapita dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pengujian struktur kedua yaitu pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian variabel gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,436 > 0,05$  hal tersebut memiliki arti yaitu gini rasio tidak memiliki hubungan atau tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan anggapan faktor lainnya konstan. Pengeluaran non makanan per kapita dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya apabila pengeluaran non makanan naik seribu rupiah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,766 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Kemiskinan dengan nilai signifikansi  $0,028 < 0,05$  menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya apabila kemiskinan naik satu persen, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun sebesar 0,20 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Persamaan Struktur dua adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_2 &= 0,037 X_1 + 0,766 X_2 - 0,204 Y_1 \\ \text{S.E} &= (8,309) \quad (0,002) \quad (0,301) \\ \text{T hitung} &= (0,785) \quad (8,250) \quad (-2,265) \\ \text{Sig} &= (0,436) \quad (0,000) \quad (0,028) \\ R^2 &= 0,913 \\ F &= 175,579 \\ \text{Prob F} &= 0,000 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_2 &= \text{Kesejahteraan Masyarakat.} \\ Y_1 &= \text{Kemiskinan} \\ X_1 &= \text{Gini rasio} \\ X_2 &= \text{Pengeluaran non makanan per kapita} \end{aligned}$$

### Hasil Pengujian Analisis Jalur

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Model tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut.

Persamaan struktur 1

$$\hat{Y}_1 = 0,223 X_1 - 0,915 X_2$$

Persamaan struktur 2

$$\hat{Y}_2 = 0,037 X_1 + 0,766 X_2 - 0,204 Y_1$$

### Nilai kekeliruan taksiran standar

Untuk mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan varian variabel kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan oleh gini rasio ( $X_1$ ), pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) dan kemiskinan ( $Y_1$ ), maka dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,786} = 0,462 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan varian variabel kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan oleh gini rasio ( $X_1$ ), pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) dan kemiskinan ( $Y_1$ ), maka dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,913} = 0,295 \end{aligned}$$

### Pemeriksaan Validitas Model

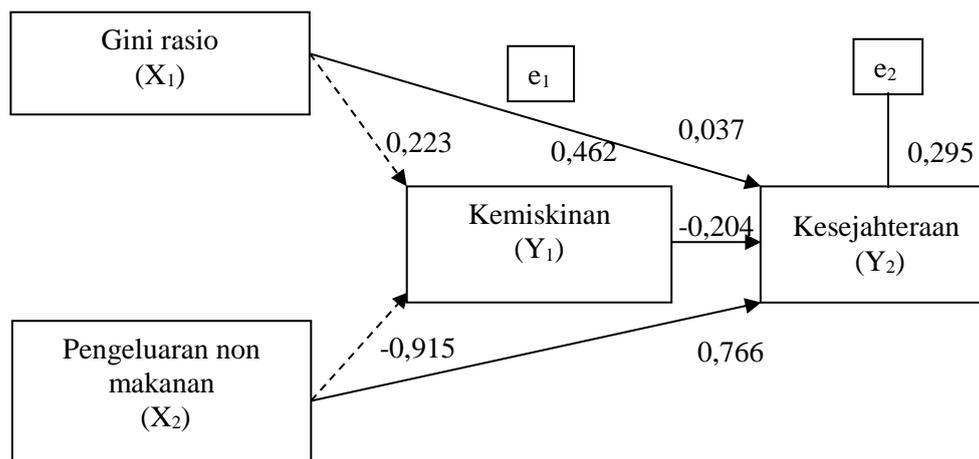
Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 \\ &= 1 - (0,462)^2 - (0,295)^2 \\ &= 1 - (0,213) - (0,087) \\ &= 1 - (0,018) \\ &= 0,981 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} R^2_m &= \text{Koefisien determinasi total} \\ e_1, e_2 &= \text{Nilai kekeliruan taksiran standar} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 98,1 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 98,1 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 1,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.



Gambar 2. Diagram Hasil Analisis Jalur

## Hasil Pengujian

### Pengujian Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung gini rasio terhadap kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,223 dan nilai probabilitas sebesar  $0,002 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Gini Rasio ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan ( $Y_1$ ). Ketimpangan distribusi pendapatan yang diproksikan dengan gini rasio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan berarti ketika ketimpangan semakin meningkat maka kemiskinan semakin meningkat. Adanya pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan karena ketimpangan merupakan bentuk dari kemiskinan itu sendiri (Barber, 2008). Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi pada akhirnya akan menyebabkan masyarakat tidak berdaya dalam menghadapi ketimpangan tersebut, sehingga masyarakat akan masuk kedalam lingkaran kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006 : 235).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annim (2012) serta Rodriguez-Paso dan Hardy (2015) dan Wijayanto (2016).

### Pengaruh langsung pengeluaran non makanan per kapita terhadap kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,915 dan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  ini berarti pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ( $Y_1$ ). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2011) serta Finkayana dan Dewi (2016), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Proporsi pengeluaran yang lebih kecil untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi (Rustariyuni, 2013). Rumah tangga yang memiliki pengeluaran non makanan yang tinggi berarti mereka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar akan makanannya dan kemudian menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan mendesak lainnya seperti pendidikan dan kesehatan (Maslow, 1984:39)

### Pengaruh Langsung Gini Rasio terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,037 dan nilai probabilitas sebesar  $0,436 > 0,05$  ini berarti gini rasio ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Patta (2012) Pratowo (2013), Yasa dan Arka (2015), dan Basuki (2016), yang memperoleh hasil bahwa Gini Rasio dan IPM memiliki pengaruh negatif signifikan. Variabel gini rasio yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang

diproksi dengan IPM dalam penelitian ini disebabkan oleh angka ketimpangan yang masuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 0,35.(Todaro dan Smith, 2006:235). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chotimah (2017) dan Sholihah dan Kustanto (2017) bahwa tidak ada hubungan antara variabel gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Fitriyah dan Rachmawati(2013) menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi antar daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan geografis, perbedaan sumber daya manusia, faktor produktivitas serta strategi pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda akibat dari perbedaan tersebut.

### **Pengaruh Langsung Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,766 dan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  ini berarti pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chalid (2010), Pratowo (2013), dan Sutawijaya, dkk. (2013) menemukan bahwa pengeluaran non makanan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IPM. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi non makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi begitu juga sebaliknya (Rustariyuni, 2013).

Berdasarkan hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, bahwa kebutuhan akan dipenuhi dari yang paling mendesak sehingga ketika kebutuhan lain selain makanan yang dipenuhi maka kebutuhan mendesak seperti makanan telah terpenuhi. Pengeluaran non makanan yang tinggi dari keseluruhan pengeluarannya berarti kesejahteraan masyarakat semakin tinggi karena pengeluaran non makanan yang meliputi pengeluaran untuk kesehatan maupun pendidikan merupakan komposit yang digunakan dalam mengukur angka IPM.

### **Pengaruh Langsung Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.204 dan nilai probabilitas sebesar  $0,028 < 0,05$  ini berarti kemiskinan ( $Y_1$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2011), Widodo (2011), Manik (2013), Chalid dan Yusuf (2014), Suwandi (2016) dan Dewi (2017) yaitu kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan masuk ke dalam lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permin-taan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas.

Produktivitas yang rendah akan berakibat pada pendapatan per kapitanya. Pendapatan per-kapita yang rendah pada akhirnya hanya cukup memenuhi kebutuhan makanan bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan akan makanan. Keadaan yang dikategorikan miskin maka masyarakat akan mengabaikan konsumsi non makanan seperti pendidikan dan kesehatan. Konsumsi non makanan yang terbengkalai pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Chalid dan Yusuf, 2014).

### **Pengaruh tidak langsung**

Pengaruh tidak langsung Gini Rasio terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(-0,682)^2(3,502)^2 + (11,690)^2(0,301)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 4,253$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien  $\beta_1$   $\beta_7$  dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$z = \frac{(11,690)(-0,682)}{4,253}$$

$$z = -1,875$$

Oleh karena z hitung sebesar -1,875 lebih besar dari -1,96 berarti kemiskinan ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung gini rasio ( $X_1$ ) terhadap kesejah-teraan masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2016. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Miranti (2010) yang menyatakan bahwa, jika distribusi penda-patan menjadi setara atau merata maka hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, begitu juga sebaliknya. Variabel kemiskinan merupakan variabel intervening hubungan antara variabel gini rasio dan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali masih berada pada ketimpangan yang rendah, sehingga variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diproksikan dengan gini rasio tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kesejah-teraan masyarakat. Variabel independen yang tidak memiliki hubungan terhadap variabel dependen maka dapat melalui variabel intervening untuk mempengaruhi variabel dependent. Ketika Variabel independent (gini rasio) tidak berpengaruh terhadap variabel dependent (kesejahteraan mas-yarakat), sedangkan variabel independent (gini rasio) berpengaruh terhadap variabel mediasi (kemiskinan) dan variabel mediasi (kemiskinan) berpengaruh terhadap variabel dependent (kesejahteraan) maka,variabel (kemiskinan) tersebut dapat dikatakan sebagai variabel mediasi sempurna (Utama, 2016:167). Pengaruh tidak langsung pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(-0,682)^2(0,001)^2 + (-0,007)^2(0,301)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,00173$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien  $\beta_2$   $\beta_7$  dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$z = \frac{(-0,007)(-0,682)}{0,002}$$

$$z = 2,387$$

Oleh karena z hitung sebesar 2,387 lebih besar dari 1,96 berarti kemiskinan ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening dalam pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan sebagai variabel intervening hubungan antara pengaruh pengeluaran non makanan per kapita terhadap kesejahteraan masya-rakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai z hitung lebih besar dari nilai z tabel yang berarti bahwa kemiskinan merupakan variabel mediasi pada pengaruh penge-luaran non makanan per

kapita terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang di dukung oleh pendapatan yang semakin tinggi tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan menuju pada hidup yang lebih sejahtera (Santosa, 2013). Finkayana dan Dewi (2016) dan Kumalasari (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada kemiskinan disuatu daerah yang selanjutnya menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan (Mirza, 2011).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gini rasio berpengaruh positif (signifikan) dan pengeluaran non makanan per kapita berpengaruh negatif (signifikan), terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Gini rasio tidak berpengaruh positif (signifikan), pengeluaran non makanan per kapita berpengaruh positif (signifikan), dan kemiskinan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Gini rasio dan pengeluaran non makanan per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barber, C. (2008). 'Notes on poverty and inequality'. *Background Paper*. Oxford: Oxfam International.
- Basuki, Agus Tri dan Endah Saptutyingsih. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kab/Kota DI Yogyakarta). *Buletin Ekonomi*. 14(1). Halaman:1-100.
- (2017). Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Berita Resmi Statistik*. Denpasar : BPS.
- (2017). Pengeluaran NonMakanan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Berita Resmi Statistik*. Denpasar : BPS.
- Breau, Sebastien, dan Richard Saillant. (2016). Regional Income Disparities in Canada: Exploring the Geographical Dimensions of an Old Debate. *Journal Regional Studies, Regional Science*.3(1). *Halaman: 463-481*.
- Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 22(2). Halaman: 1-12.
- Chalid, Nursiah. (2010). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Riau.. *Jurnal Ekonomi*. 18(1). Halaman: 28-40.
- Cherodian, Rowan dan A. P. Thirlwall. (2013). Regional Disparities in Per Capita Income in India: Convergence and Divergence?. *Discussion Papers*. School of Economics, University of Kent, Canterbury, Kent.
- Chotimah, Khusnul. (2017). Analisa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 5(2). Halaman: 1-17.
- Finkayana, Arya dan Urmila Dewi. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *E-Journal EP Unud*. 5(7). Halaman: 861-881.
- Fitriyah, Lailatul dan Lucky Rachmawati. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbang kertokusila Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 1(3). Halaman: 1-16.
- Fleisher B, Haizheng Li, dan Min Qiang Zhao. (2010). Human capital, economic growth, and regional inequality in China. *Journal of Development Economics*. 92(2), Halaman: 215-231.
- Ganie-Rochman, Meuthia. (2013). Disparitas Pendapatan. *Kompas*.

- Hariwan, Peggy dan Ayu Swaningrum. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). Halaman: 72-82.
- Kumalasari, Merna. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Manik, Tumpal. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, *Intergovernmeakbarntal Revenue* dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 9(2). Halaman: 107-124.
- Maslow, Abraham H. (1984). *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia (Judul asli: Motivation and Personality)*. Diterjemahkan oleh Nurul Iman. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Miranti, Riyana. (2010). Poverty in Indonesia 1984-2002: The Impact of Growth and Changes in Inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (1), Halaman: 79-97.
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. 1(1). Halaman: 102-113.
- Murdiansyah, Isnan. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang, *Jurnal Wiga*. 4(1). 71-92.
- Nugraha, Kunta and Phil Lewis. (2013). Toward a Better Measure of Income Inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), Halaman: 103-112.
- Patta, Devyanti. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makasar.
- Prastyadewi, Ika, dkk. (2013). Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Dalam Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tenganan Pegringsingan. *Equilibrium*. 11(1). Halaman: 30-41.
- Pratowo, Nur Isa. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*. 1(1). Halaman:15-31.
- Rodriguez-Pose, A. and D. Hardy. (2015). Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global. *Applied Geography*. Halaman: 1-13.
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2013). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan per kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA UNUD*. 10(1). Halaman: 45-55.
- Santosa, Budi. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran non makanan daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 5(2).
- Sholihah, Fitriyatus dan Munari Kustanto. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. *Working paper*. Universitas Kanjuruhan Malang.
- Solikatun, dkk. (2014). Kemiskinan dalam Pembangunan. *Journal Analisa Sosiologi*. 3(1). Halaman: 70-90.
- Subarna, Trisna. (2012). Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non Pangan Penduduk Jawa Barat. *Journal Bina Praja*. 4(4). Halaman: 243-250.
- Sutawijaya, Andi Angger, Siti Rochaeni, dan Achmad Tjachja N. (2013). Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Ikan Hias Air Tawar di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Madya Jakarta Selatan. *Jurnal Agribisnis*. 7(1). Halaman: 59-76.
- Suwandi. (2016). The Influence of Economic Growth on Poverty, Investment, and Human Development Index in Fak, Fak District, West Papua Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. 7(3). Halaman: 69-72.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi*

- Kedelapan. Jakarta; Erlangga.
- Utama, Suyana. (2012). Aplikasi Analisis Kuantitatif (Edisi Keenam). Diklat Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Widodo, Adi, Waridin dan Johanna Maria K. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1(1). Halaman: 25-42.
- Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economic Development Analysis Journal*. 1(2). Halaman: 1-11.
- Wijayanto, Anton Tri. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. 16(2). Halaman: 418-428.
- Yasa, Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). Halaman: 63-71.